

2024



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**LAPORAN
KINERJA TAHUN
2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. LUWU TIMUR**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan fungsi dan pelayanan oleh instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, hendaknya berdasar atas sejumlah dokumen perencanaan yang sinergis dan konsisten.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Program yaitu masih rendahnya kemampuan manajerial pengelola Program untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk itu diperlukan kemampuan manajerial pengelola program melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari atasan masing-masing program, dan kedepan kerjasama lintas program dan lintas sektor perlu ditingkatkan.

Masih adanya pengelola program/penanggungjawab program yang belum mengelola dana yang diterimanya secara efektif yang disebabkan keterbatasan SDM baik jumlah maupun kualitas. Hal yang akan dilakukan untuk mengantisipasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bila hal tersebut terjadi segera dapat dicarikan solusinya. Untuk kedepan pengawasan internal dari atasan langsung terhadap kinerja pelaksana program mutlak diperhatikan.

Kiranya Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan menempatkan Program Keluarga Berencana sebagai bagian dari prioritas pembangunan SDM dan memperhatikan sepenuhnya pembangunan yang berwawasan pemberdayaan keluarga, karena bagaimanapun majunya

pembangunan di semua sektor, tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada masyarakat terutama kategori Keluarga Pra Sejahtera dan KS I jika tidak diimbangi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Malili, Februari 2024

Kepala Dinas,



Dra. Hj. Puspawati

Pangkat : Pembina

N I P : 19670308 199402 2 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
BABI. PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum Organisasi	1
b. Struktur Organisasi	3
c. Permasalahan Utama (strategic issued)	4
BABII. PERENCANAAN KINERJA	6
a. Rencana Strategis SKPD	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan dan sasaran strategis	8
b. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
c. Perjanjian Kinerja	12
BABIII. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan	20
C. Realisasi Anggaran	27
BABIV. PENUTUP	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Peningkatan akuntabilitas publik para penyelenggara Negara khususnya eksekutif pemerintahan, pada dasarnya merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan yang baik adalah system akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem ini merupakan langkah-langkah reformasi yang telah ditetapkan untuk peningkatan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Negara.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan system manajemen yang berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah sebagai instansi Pemerintah Kabupaten/Kota

yang mengemban urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan merupakan perpanjangan tangan instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN. Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan tugas pokok melaksanakan urusan otonomi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana .

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi:
 - Subbagian Perencanaan dan kepegawaian; dan
 - Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - Sub coordinator jabatan Fungsional;
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - Sub coordinator jabatan Fungsional dan
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 - Sub coordinator jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Permasalahan Utama (strategic issued)

Perencanaan Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan lanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (Renstra) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan paling krusial tentang layanan dasar OPD untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

- Masih rendahnya keinginan bagi Pasangan Usia Subur untuk ber KB, padahal sudah tidak ingin memiliki anak lagi

- Masih rendahnya capaian peserta KB aktif pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
- Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja
- Masih tingginya rata-rata usia kawin pertama bagi wanita
- Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga
- Pendapatan keluarga pra Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) yang rendah
- Masih kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi.
- Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi program
- Pencatatan dan Pelaporan Rutin sebagai bahan monitoring dan evaluasi program tidak berjalan dengan baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategic merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategic instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan system manajemen.

Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra SKPD merupakan RPJMD SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2021-2026. Lebih lanjut uraian pokok-pokok Rencana Strategis SKPD diuraikan dalam poin-poin selanjutnya.

1 Visi dan Misi SKPD

Visi Merupakan gambaran masa depan tentang hal-hal yang diinginkan yang dapat membantu untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus diselenggarakan. Visi harus inspiratif, menantang dan memberi motivasi kepada anggota instansi.

Mengacu pada batasan tersebut, maka visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur harus mendukung Visi Bupati Luwu timur periode 2021-2026 yaitu :

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

Misi suatu Instansi sangat diperlukan untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan atau produk suatu instansi selalu mengarah kepada pencapaian visi (tujuan jangka panjang).

Dalam mencapai misi Bupati Luwu Timur dan wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menjalankan misi yaitu :

Misi 1

- *Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluh*

Misi 4

- **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**

2 . Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai misi dan visi seperti yang telah dikemukakan terdahulu maka harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi, dan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur periode 2021 – 2026, beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran startegis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tahun -2021 - 2026

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Penduduk yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,99	1,99	1,79	1,7	1,63	1,57	1,57
		Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,79	2,66	2,6	2,53	2,47	2,4	2,4
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 1-100)	35,05	35,05	35,52	36,02	36,22	36,32	36,33
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	65	65	70	75	80	80	80
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada Peraturan Menteri Negara/Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KB Kab. Luwu Timur	<p>Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</p> <p>Bidang Keluarga Berencana.</p>

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Keterangan : TFR = Total Fertility Rate JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu. JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.</p>		
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	<p>iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100</p> <p>Dimana :</p>	Laporan Statistik Rutin Dinas P2KB Kab. Luwu Timur	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				<p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;</p>		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;</p>		
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah total Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah kegiatan-kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	SEKRETARIAT

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, maka ditetapkan perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja.

Target Kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategi sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2.53%
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	36.02

3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%
---	--	---	------

D. Rencana Anggaran Perubahan DPPKB Tahun 2023

Dalam pelaksanaan IKU (Indikator Kinerja Utama) DPPKB, rencana strategis sertaprogram dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2023 harus didukung dengan Anggaran APBD-P Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp 10.606.709.882,-** (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Tujuh ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan puluh Dua Rupiah).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 3.433.414.732,-
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 380.848.050,-
3	Program Pembinaan dan Keluarga Berencana	Rp. 4.639.401.100,-
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 2.153.046.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan unit organisasi sebagai penjabaran dari strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada setiap unit organisasi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan performasi organisasinya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kinerja suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik. Penyajian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perwujudan good governance. Penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP yang disusun menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu laporan ini selain menjelaskan capaian kinerja yang terealisasi juga diuraikan mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan).

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan DPPKB Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Target Kinerja suatu Instansi Pemerintah keberhasilan dan kegagalan suatu capaian kinerja organisasi dapat terlihat dari hasil perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang tercapai. Semakin tinggi tingkat capaian kinerja yang diperoleh maka semakin baik kinerja suatu instansi Pemerintah begitupun sebaliknya semakin rendah capaian kinerja maka semakin buruk pula kinerja instansi tersebut. Sehingga dengan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja dan tolak ukur untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini:

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALIAS I	%
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,53	2,31	91,30
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	36,02	65,36	181,45
3	Meningkanya kualitas dan pencapaian kinerja	Persentase capaian kinerja program	100	100	100

	penyelenggara n urusan perangkat daerah	perangkat daerah			
--	--	---------------------	--	--	--

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 diuraikan sasaran per sasaran strategis berikut indikator kinerjanya masing-masing. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

“Menurunnya Angka Kelahiran”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel. 6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Total Fertility Rate (TFR)	2,53	2,31	91,30
Persentase Capaian Rata-rata			91.30

Sumber: SP 2020 BPS

Untuk menghitung TFR dengan rumus sebagai berikut:

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i

i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Keterangan :

TFR = Total Fertility Rate

JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.

JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.

Indikator Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator yang capaiannya semakin rendah (menurun) maka dinyatakan semakin baik. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana}-(\text{Realisasi-Rencana}) \times 100}{\text{Rencana}}$$

Rata-rata capaian sasaran diatas tahun 2024 adalah sebesar 91,30 atau kategori belum mencapai target menjadi kinerja DPPKB tahun yang akan datang. Capaian realisasi tahun 2023 masih menggunakan sumber data SP tahun 2020 (BPS).

Untuk meningkatkan kinerja ditahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor serta konseling informasi dan edukasi pelayanan KB.

- ❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Total Fertility Rate (TFR) yaitu :
 - Program Pengendalian Penduduk
- 1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - 1. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB Petugas Lapangan KB PKBPLKB
 - 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah KabupatenKota
 - 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Total Fertility Rate (TFR), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. Masih tingginya angka drop out, sehingga mempengaruhi tingginya angka unmetneed (KB tidak terlayani)
2. Masih tingginya angka kelahiran Menurut Umur (ASFR 15-19)
3. Masih rendahnya angka kesertaan ber-KB, dimana masih banyak Masyarakat yang enggan melakukan KB dengan berbagai alasan. Diantaranya factor Kesehatan (medis), budaya dan kepercayaan, serta masih adanya stigma dimasyarakat bahwa peserta KB hanyalah Perempuan.
4. Masih tingginya angka pernikahan usia dini (<20 tahun)

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu:

1. Perlunya peningkatan pembinaan administrasi pencatatan dan pelaporan secara berkesinambungan, sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi secara periodic
2. Perlunya peningkatan kapasitas pembinaan dan pelayanan kepesertaan ber KB untuk diarahkan menjadi peserta KB MKJP, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, khususnya bagi peserta KB non MKJP. Hal ini disebabkan bahawa metode KB Non MKJP sangat rawan terjadi kegagalan (kehamilan), yang berakibat meningkatnya angka Drop out (putus menjadi peserta KB).
3. Peningkatan pembinaan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja
4. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Program Bangga kencana yang dilaksanakan melalui pembinaan secara rutin dan berkesinambungan
5. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Upaya -upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a. Koordinasi dan Kerjasama dengan lintas sektor
- b. Peningkatan Pelayanan KB
- c. Adanya dukungan Operasional pelaksanaan bangga kencana ditingkat lini lapangan.
- d. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,53	2,31	91,30	5.020.249.150	4.942.466.090	97,99%
Program Pengendalian Penduduk	Rata rata jumlah anak per keluarga	2	1,72	86	380.848.050	358.208.475	84,77%
Program Pembinaan Keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	26,76 %	35,41%	132,32%	4.639.401.100	4.584.257.615	99,35%
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	39,14 %	33,84	86,36			
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,4%	11,37	91,69			

	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (%)	58,9%	71,15	120,80			
--	---	-------	-------	--------	--	--	--

Tabel. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	91,30	98,45%	1,07

Pencapaian sasaran strategis Menurunnya Angka Kelahiran sebesar 91,30% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,45%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 1,07%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

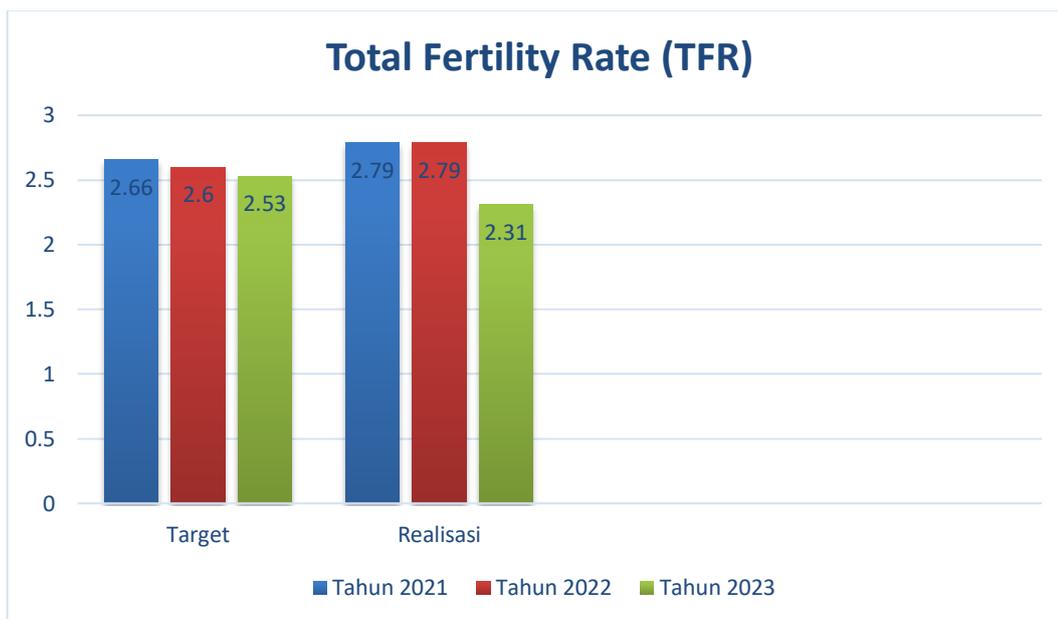
2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 10
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I : Menurunnya Angka kelahiran										
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026
	Targ et	Real isasi	Cap aian	Targ et	Re alis asi	Cap aian	Target	Realis asi	Capai an	
Total Fertility Rate (TFR)	2.66 %	2,7 9	100 %	2,6	2,7 9	100 %	2,53	2,31	91,30	2,4%

Perbandingan Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran

Perbandingan realisasi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2021-2022 tidak mengalami kenaikan hal ini dapat kita lihat pada tabel. Namun Pada tahun 2021 Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,79 dan Pada tahun 2022 pencapaiannya sebesar 2,79, TFR ditentukan oleh Batasan target tahun 2023 ada pada angka 2,53 realisasi 2,31 % sehingga indikator ini dikatakan mencapai target karena Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,31% angka ini dibawah dari batas target yang ditentukan tetapi di diambil dari hasil SP BPS tahun 2020. Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



❖ **Program Keluarga Berencana**

Target program tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021		2022		2023	
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	15,61%	35,41%	28,16%	35,41%	26,76	35,41%
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka	36,64%	37,30%	37,89%	34,24%	54,88	33,84

LAKIP DPPKB 2023

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021		2022		2023	
		Panjang (MKJP) (persen)						
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen)	13,46%	18,43%	12,88%	20,45%	12,40	11,37
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	57,20%	56,90%	58,00%	66,37%	58,9	71,15
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)	100	100	100	100	100	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12	12	12	12	12	12
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan (jenis)	8	8	8	8	8	8
2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	11.500	11.635	11.500	9.545	11.500	11.500
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi (Fasilitas Kesehatan)	21	21	21	21	21	21

LAKIP DPPKB 2023

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2021	2022	2023	2023		
	Jaringan dan Jejaringnya							
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	422	422	27	27	76	76

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun lalu dan tahun 2023 ada beberapa yang mengalami penurunan dimana jika capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan maka dikatakan berhasil dapat dilihat pada tabel diatas seperti capaian realisasi **Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen), Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen)**, Namun ada juga indikator ini sifatnya dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)**, **Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)**

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai..

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra DPPKB Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 – 2026)

Sasaran I : Menurunnya Angka Kelahiran					Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Total Fertility Rate (TFR)	2,79	2,79	2,31	2,79	2,4 %	2,4%

4. Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2023 dengan capaian BKKBN Provinsi dan capaian BKKBN Nasional menurut PK 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan target BKKBN Provinsi dan target BKKBN Nasional Menurut PK 2023.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Capaian Kinerja Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2023	2023
1.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,53	2,31	2,13	2,14
2.	Pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	%	58,9	71,15	59,0	59,04
3.	Kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	12,44	11,37	11,07	11,05

LAKIP DPPKB 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Capaian Kinerja Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2023	2023
5.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	%	26,76	30,60	24,4	19,7

Pada tabel 3.3 diatas dari keempat indikator utama DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2023 yang menarik perhatian adalah capaian angka TFR. Bila dibandingkan dengan capaian Renstra BKKBN Provinsi maupun capaian BKKBN Nasional, angka 16.59% masih jauh dari harapan. Hal ini masih menjadi “PR” utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur, bagaimana strategi dan upaya untuk menurunkan angka TFR tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor penentu utama keberhasilan Total Fertility Rate (TFR) adalah dilihat dari :

- usia perkawinan pertama
- program KB
- Tingkat Pendidikan
- status pekerjaan

Faktor Pendukung lainnya :

- Petugas lapangan (PLKB) di Luwu Timur jumlahnya di atas ratio PLKB nasional yakni 100 PLKB sementara jumlah desa yang ada hanya 127 desa.
- Adanya dukungan dari mitra (puskesmas dan RS sebagai penyedia tenaga medis dalam kegiatan pelayanan keluarga berencana)
- Dukungan anggaran yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari pusat melalui anggaran DAK

6. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan sebagai pendukung pencapaian sasaran Strategis I yang terdiri dari 2 Program Ini dengan pagu anggaran perubahan sebesar **Rp 5.020.249.150,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 4.942.466.090,-** sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **98,45%**. Sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar **91,30%**.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja Program Pengendalian Penduduk yaitu Rata rata jumlah anak per keluarga (anak) yang diukur dengan Formula :

$$\begin{aligned} \text{Rata-Rata Jumlah anak per keluarga} &= \frac{\text{Jumlah Anak} \times 100\%}{\text{Jumlah KK}} \\ &= \frac{124.295 \text{ anak} \times 100\%}{71.924 \text{ KK}} \\ &= 1,72\% \end{aligned}$$

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - ✓ Sub kegiatan Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal
 - ✓ Sub. Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
 - ✓ Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

- ✓ Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana yaitu:

- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) ditargetkan 58,90% dan terealisasi 62,86 atau dengan capaian 112,68 % sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

$$= \frac{34.508}{48.500} \times 100 = 71,15$$

Capaian Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Jumlah Pasangan Usia Subur	Prosentase (%)
1	BURAU	3.880	5.547	66,12
2	WOTU	3.927	5.300	67,60
3	TOMONI	3.416	4.750	63,22
4	MANGKUTANA	2.633	3.489	68,34
5	TOMONI TIMUR	1.747	2.392	69,65
6	KALAENA	1.730	2.286	68,16
7	ANGKONA	3.639	4.845	67,22
8	MALILI	4.545	6.612	58,80
9	WASUPONDA	2.203	3.141	57,28
10	TOWUTI	4.325	6.206	57,51
11	NUHA	2.463	3.932	52,49
	JUMLAH	34.508	48.500	71,15

- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), capaiannya : 30,60% tidak mengguna formulasi tetapi bersumber dari data Long form SP 2020 (BPS)
- Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 12,40% dan terealisasi 11,37 atau dengan capaian 91,69% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah PUS yang tidak ber KB} \times 100\%}{\text{Jumlah PUS}}$$

$$= \frac{5.515}{48.500} \times 100 = 11,37$$

Capaian Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

No.	Kecamatan	Jumlah PUS Yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)	Jumlah Pasangan Usia Subur	Prosentase (%)
1	BURAU	817	5.270	15,50
2	WOTU	822	4.976	16,52
3	TOMONI	879	4.610	19,07
4	MANGKUTANA	557	3.514	15,85
5	TOMONI TIMUR	256	2.266	11,30
6	KALAENA	320	2.117	15,12
7	ANGKONA	532	3.898	13,65
8	MALILI	1.302	6.201	21,00
9	WASUPONDA	590	2.373	24,86
10	TOWUTI	1.394	6.111	22,81
11	NUHA	738	3.193	23,11
	JUMLAH	8.207	44.529	18,43

- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditargetkan 39,14% dan terealisasi 33,84% atau dengan capaian 91,04% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah penggunaan KB jangka panjang} \times 100}{\text{jumlah KB aktif}}$$

$$= \frac{11.680}{34.508} \times 100 = 33,84$$

Capaian Persenyase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

No.	Kecamatan	Jumlah metode Kontrasepsi Modern				Total	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Prosentase (%)
		IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBETOMI			
1	BURAU	976	109	0	131	1.216	3.337	36,44
2	WOTU	764	196	0	128	1.088	3.203	33,97
3	TOMONI	563	160	0	107	830	2.791	29,74
4	MANGKUTANA	459	277	2	88	826	2.286	36,13
5	TOMONI TIMUR	423	145	2	60	630	1.487	42,37
6	KALAENA	356	179	0	38	573	1.383	41,43
7	ANGKONA	741	274	13	75	1.103	2.490	44,30
8	MALILI	638	88	4	143	873	3.511	24,86
9	WASUPONDA	362	85	1	98	546	1.294	42,19
10	TOWUTI	704	233	3	269	1.209	3.379	35,78
11	NUHA	192	282	3	173	650	1.621	40,10
	JUMLAH	6.178	2.028	28	1.310	9.544	26.782	35,64

Sasaran 2 :

“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Realisasi Indikator kinerja Untuk Sasaran 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	36,02	65,36	181,45
Persentase Capaian Rata-rata			181,45

Sumber: PK 2023

Untuk mendapatkan angka realisasi digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$iBangga = 1/3 (\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$$

Dengan Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{I bangga} &= \frac{\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3} \\ \text{Ketentraman} &= 66,96 \\ \text{Kemandirian} &= 57,26 \\ \text{Kebahagiaan} &= 71,85 \\ \text{I Bangga} &= \frac{66,96+57,26+71,85}{3} \\ &= 65,36 \end{aligned}$$

Dimana:

Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu

- (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;**
- (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;**
- (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;**

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2023 capaiannya diatas dari target yang ditetapkan yakni 35,05% realisasi 65,36% persentase capaian rata-rata yaitu 181,45 % berarti capaian diatas target yang ditentukan ini menunjukkan indeks pembangunan keluarga meningkat dari target, namun dilihat dari Indeks (Skala 1-100) angka ini masih masuk dalam kategori (rendah) dan menjadi tantangan untuk tetap menaikkan realisasi iBangga dengan melaksanakan program untuk mencapai indeks pembangunan keluarga.

Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan menciptakan minat, semangat, keterampilan serta kinerja keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan KS I diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Realisasi yang melebihi target ini harus tetap menjadi perhatian atau dikawal agar angka Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tetap dapat dipertahankan.

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Pada dimensi ketentraman terdiri dari 4 indikator, yaitu kegiatan ibadah, Legalitas keluarga, Jaminan kesehatan dan Keharmonisan keluarga. Adapun variabelnya ada 6 yaitu : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, (2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (3) Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), (5) Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik : a)Tanpa tegur sapa; b) Pisah ranjang antara suami dan istri; c) Anggota keluarga pergi dari rumah/minggat; d) Kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga, (6) Keluarga mengalami cerai hidup.

Kemudian pada Dimensi Kemandirian terdiri dari 5 indikator yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar, Keberlangsungan pendidikan, Kesehatan keluarga, Akses informasi, dan Jaminan keuangan. Adapun variabelnya ada 7 terdiri dari: (1) Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan, (2) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 kali sehari, (3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni, (4) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan, (5) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat, (6)

LAKIP DPPKB 2023

Selama 1 bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas , (7) Keluarga memiliki akses informasi dari media online (internet)

Dimensi Kebahagiaan terdiri dari 2 indikator yaitu Interaksi keluarga dan Interaksi sosial. Adapun variabelnya ada 4 yang terdiri dari : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, (2) Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, (3) Selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah, (4) Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial / gotong royong di lingkungan RT.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35.52 %	53,07	35,05	53,07	36,02	65,36

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2021 sebesar 53,07%, pada Tahun 2022 sebesar 53,07 % dan tahun 2023 sebesar 65,36% sehingga capaian ini tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 tetapi di tahun 2023 mengalami kenaikan namun belum bisa dikatakan berhasil.

Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Adapun Program/kegiatan pendukung pada indikator ini yakni:

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yaitu Rata-rata usia Kawin Pertama

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - ✓ Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - ✓ Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
 - ✓ Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - ✓ Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
 - ✓ Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - ✓ Advokasi dan Promosi IPK
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - ✓ Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2022 dengan target jangka menengah pada Renstra DPPKB Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran 2 :		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga				Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi						
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023			
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,07	53,07	65,36	53,07	36,33	87%	

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dengan target BKKBN Provinsi dan target BKKBN Nasional Menurut PK 2023.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Capaian Kinerja Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2023	2023
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	35,05	65,36	61,31	61,43
2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20	22,5	22,3	22,3

LAKIP DPPKB 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	Capaian Kinerja Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	Realisasi	2023	2023
	(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun					

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan secara terus menerus adalah :

- ❖ Persentase Akseptor terhadap PUS, kendala yang biasa ditemukan antara lain :
 - Adanya PUS yang belum memiliki anak
 - PUS yang berhenti ber KB karena ingin anak lagi
 - Adanya sebagian PUS yang merasa tidak cocok dengan alat kontrasepsi sehingga lebih memilih untuk tidak ber KB
 - Keterbatasan penyediaan alat kontrasepsi yang selama ini hanya menunggu drop dari pusat
 - Beberapa efek samping penggunaan alat dan obat kontrasepsi, bahkan kejadian kehamilan pada akseptor mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas penggunaan alat dan obat kontrasepsi utamanya pada penggunaan alat dan obat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- ❖ Pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan (Tribina, UPPKS), beberapa kendala yang ditemukan antara lain :
 - Petugas Pembina kelompok kegiatan (Poktan) dalam hal ini PLKB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader kelompok kegiatan yang terkait masih ada yang belum terampil.
- ✓ **Upaya Pemecahan Masalah**
 - Melakukan pelayanan KB secara menyeluruh mulai dari daerah perkotaan, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dengan tetap mematuhi prokoler Kesehatan.

LAKIP DPPKB 2023

- Meningkatkan intensitas Pembina oleh tenaga lini lapangan (PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiatan).
- Peningkatan keterampilan bagi tenaga lini lapangan (PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiatan)

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD sebagai pendukung pencapaian sasaran Strategis III yang terdiri dari 1 Program Ini dengan pagu anggaran sebesar **Rp 2.137.446.000,-** dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV sebesar **Rp 2.116.217.020,-** sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **99,01%**. Sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar **181,45%**.

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	36,02	65,36	181,45	2.137.446.000	2.116.217.020	99,01%

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang kebersihan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung *Indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga, dengan indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*

➤ **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Target program tahun 2021,2022 dan 2023 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub kegiatan (Output)	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata Usia kawin pertama	50,94	52,8	20 tahun	20 tahun	20 tahun	22,5 tahun
2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (persen)	71,13	72	71,18	71,73	71,18	71,73
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (kelompok)	50	50	60	60	60	60
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok yang terbentuk (kelompok)	5	5	6	6	6	6
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi (kelompok)	25	25	26	26	26	26

Dari tabel diatas dapat dilihat target tahun 2023 yaitu **20 tahun** dengan realisasi **22,5 Tahun** menjelaskan bahwa program pendukung dalam dalam meningkatkan indeks pembangunan keluarga (ibangga) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dalam menjalankan program tersebut didukung oleh kegiatan kegiatan dalam yang dapat meningkatkan perkembangan pembangunan keluarga dilingkup masyarakat.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

program/kegiatan apa saja di tahun 2023 yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.606.709.882,- dimana 49% anggaran atau sebesar Rp. 4.920.886.878,- berasal dari dana APBD murni dan APBD Perubahan, dan sisanya 51 % atau sebesar Rp. 5.126.630.000,- berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terbagi dalam 4 Program, 15 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Hasil realisasi sampai dengan triwulan IV, total rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program 1 s.d. program 4 (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana/KB, dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/KS) sebesar 98,84% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST). Rata-rata Capaian Anggaran dari seluruh program 1 s.d. program 4 adalah 99,44% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang ada pada tahun 2023 menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur

SASARAN 3 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**” tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023				
	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	●	

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai

Target

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “**Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus**”.

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Persentase capaian mencapai target. Hal inilah yang mempengaruhi realisasi kinerja secara keseluruhan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan pengelolaan Administrasi kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Terdapat jabatan fungsional penyeteraan dan jabatan kepala dinas yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterlambatan proses administrasi keuangan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- Percepatan proses administrasi keuangan
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran

- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPPKB, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisas	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	3.433.414.732,-	3.409.873.067,-	99,31%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	3.433.414.732,-	3.409.873.067,-	99,31%

Tabel. 21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,31%	0,60%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,31%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0,60%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 22
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65			70	79,25	113,21	75			
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Terdapat harga satuan sesuai dengan SBM untuk 1 unit peralatan, tetapi dapat membiayai lebih dari beberapa unit

peralatan misalnya pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, banyak diklat/pelatihan yang diikuti tetapi pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara
3. Beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan beberapa kegiatan lainnya tercapai sesuai target

Namun terdapat pula kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 yaitu

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena terkendala harga di e-catalog yang lebih tinggi dari harga toko sehingga metode pembeliannya dilakukan melalui mbizmarket.
- b. Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi keuangan (SPJ).

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 23
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah				Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi						
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023			

Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	100%	100%	100%	100%
--	------	-----	------	------	------	------

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 24
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100,%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	93,33%	93,33%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	15 Org	13 Org	86,67%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%
a.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	8 Dok	8 Dok	100%
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Org	2 Org	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100,4%	100,4%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	275 Org	100%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	411 Kali	411 Kali	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	400 Surat	543 Surat	135,75%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik	36 Rek	36 Rek	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
	Sumber Daya Air dan Listrik	kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	kantor yang terbayarkan			
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	113,6%	113,6%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	95 Unit	95 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	52 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**
Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%%, dan menyerap anggaran sebesar 99,31%. Capaian kinerja program melebihi target karena terdapat beberapa kegiatan capaian kinerjanya >100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan yaitu :

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 10 dokumen. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Renja Tahun 2024 dan Renja Perubahan tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 25.010.000,-. Dengan realisasi keuangan sampai triwulan IV sebesar Rp. 24.918.950,- (99,64%).

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 1 dokumen (50%) yaitu penyusunan RKA Perubahan 2023 serta RKA Pokok 2024. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.000.000,-. Dan realisasi sampai triwulan IV sebesar Rp 2.638.540,- (87,95%).

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2023 dan DPA Perubahan Tahun 2023. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.000.000, Realisasi keuangan sampai dengan TW IV sebesar Rp. 2.889.600 (96,32%).

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu LPPD, LKPJ, Lapkin Tahun 2022, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Dokumen Evaluasi Renja TW I, II & III TA. 2023 dan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2023. Disediakan anggaran sebesar Rp 25.610.000, Realisasi keuangan sampai dengan TW IV sebesar Rp. 25.374.350 (99,08%).

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 99,39% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 20 org dan realisasi 20 org dengan persentase capaian kinerja 100 %. Dilakukan perubahan target kinerja pada saat perubahan anggaran yaitu dari 19 org menjadi 20 org. Disediakan anggaran sebesar Rp 2.321.620.837,-. Realisasi keuangan sebesar Rp 2.307.407.025,- atau (99,39%)., terdapat penambahan ASN pada DPPKB Kab. Luwu Timur.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulan I, II, III & IV sebanyak 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok dan laporan semester I & II sebanyak 2 dokumen. Disediakan anggaran sebesar Rp 31.760.000,- Realisasi keuangan

sampai dengan Tw IV sebesar Rp 31.597.770,- atau (99,49%).

➤ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%.

Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 16.290.000,- Realisasi keuangan sampai TW IV sebesar Rp 16.286.600,- (99,98%).

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 166,67% dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Capaian kinerja melebihi target karena pada triwulan III dan IV, terdapat beberapa bimtek atau diklat yang dilaksanakan oleh OPD lain yang diikuti oleh personil DPPKB dan pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari Laporan Pemutakhiran Data Pegawai. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 22.270.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 21.442.110,- atau 96,28%.

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target Tahun 2023 sebanyak 15 org dan realisasi 25 orang dengan persentase capaian kinerja 166,67%. Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Bimtek MC 2 org, Bimtek Barang dan jasa 1 org, Bimtek ESQ 1 org, Bimtek Pengelolaan Keuangan TAPD, Kepala OPD & Banggar 1 org, Bimtek PPID Bimtek SKPD 2 org. Disediakan anggaran kas s.d triwulan IV sebesar Rp 40.660.000, terdiri dari belanja kontribusi Rp 30.000.000, dan belanja perjalanan dinas Rp 25.780.000. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 35.451.000,- atau 87,19%.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100,4% dengan persentase capaian kinerja 100,4%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian

>100%, dan capaian tersebut mempengaruhi capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel Listrik, Lampu LED, Conector/Adaptor, Isolasi, Pitting, Kabel SR, Terminal, Steker, Lampu Sorot. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp 3.249.000,- atau 99,97%..

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 3 jenis dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri 17 jenis alat dan bahan kebersihan yaitu Tisu, Harpic (pembersih kamar mandi), Super pel (pembersih lantai), Stella (pengharum ruangan), Sabun Cair, Alat pel, sapu, sikat kamar mandi, sapu lidi bergagang, Tempat sampah besar, keranjang sampah, sikat kloset, alat pel, tempah sampah besar dan sedang, pembersih kamar mandi. Disediakan anggaran sebesar Rp 5.800.000, dan terealisasi Rp 5.793.500,- atau 99,89%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3

jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Disediakan anggaran sebesar Rp 7.500.000, dan realisasi keuangan Rp 7.344.200,- atau 97,92%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, target tahun 2023 sebanyak 60 exp dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 expl, Koran Nasional 12 expl dan Koran Regional 36 expl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.120.000,- dan terealisasi Rp 5.120.000,- atau 83,66%.

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target pada tahun 2023 sebanyak 275 org dan terealisasi 275 org dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.600.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.589.000,- atau 99,94%.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target tahun 2023 sebanyak 411 kali dan terealisasi 411 kali dengan capaian kinerja 100%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan

anggaran sebesar Rp 563.453.400, dengan realisasi keuangan Rp 563.296.127,- atau 99,97%.

➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 111,91% dengan persentase capaian kinerja 111,91%. Capaian kinerja melebihi dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, capaian kerjanya >100% sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target tahun 2022 sebanyak 400 surat dan terealisasi 543 surat dengan persentase capaian kinerja 135,75%. Terdiri dari 354 surat masuk dan 189 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 14.999.000,-. Dan terealisasi Rp 14.960.500,- atau 99,74%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target tahun 2022 sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. terdiri dari Listrik 2 rek, Token listrik gudang logistik 2 rek, Air kantor 12 rek, dengan persentase capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 54.871.495,- Dan terealisasi Rp 54.169.619,- atau 98,72%. Terdapat sisa anggaran belanja listrik yang

cukup besar karena Penggunaan anggaran bersifat Riil Cost.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan Penjaga Malam. Disediakan anggaran s.d triwulan IV sebesar Rp 40.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 40.800.000,- atau 100%.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah melebihi target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya 100%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan, faktor yang mempengaruhinya adalah SBM untuk 1 unit peralatan bisa untuk membiayai beberapa peralatan lainnya. Dan pada dasarnya BMD yang dipelihara adalah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 95 unit dan realisasi 95 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 90 unit, Mobil Alkon 1 unit, Double Cabin 1 unit, Mobil Akseptor I Unit, dan 1 unit Innova Disediakan anggaran sebesar Rp 148.000.000,- Dan terealisasi Rp 147.965.176,- atau 99,98%. Realisasi keuangan lebih besar dari realisasi kinerja karena kondisi beberapa kendaraan dinas roda empat sering mengalami kerusakan, disamping karena umur ekonomisnya yang lebih dari 10 tahun juga mobilitas yang tinggi. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan/perbaikan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target tahun 2023 sebanyak 35 unit dan terealisasi 52 unit dengan persentase capaian kinerja 148,57%. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan yaitu AC 5 unit, printer 10 unit, PC 7 unit, Laptop 10 unit. Capaian yang melebihi target karena besaran anggaran yang disediakan untuk setiap unit peralatan sesuai dengan SBM, cukup untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 9.800.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp 9.730.000,- atau 99,29%. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Disediakan anggaran sebesar Rp 70.000.000,- dan realisasi Rp 69.850.000,- atau 99,79

3.3 Tindak Lanjut hasil Evaluasi

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP tahun yang lalu

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Agar memonitor pencapaian target jangka menengah dan terdapat pejabat/staf yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik dan selanjutnya hasil monitoring ditindaklanjuti;	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan ke bidang-bidang	Telah dilakukan rapat evaluasi kinerja, Bidang telah membuat laporan kinerja
2.	Agar memanfaatkan Capaian kinerja dan monitoring rencana aksi ; <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (reward); - Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; - Capaian target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan 	Melakukan Peningkatan kualitas pengukuran kinerja berkala tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> ;	Belum aturan yang mengatur terkait reward dan punishment
3.	Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang sampai pada staf sesuai SOP dan hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment;	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai pada eselon IV	Bidang telah membuat laporan kinerja
4.	Agar Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai pada eselon IV	Bidang telah membuat laporan kinerja
5.	Agar laporan kinerja menyajikan informasi efisiensi sumber daya terkait pencapaian sasaran, menyajikan informasi perbandingan capaian kinerja dengan capaian	Telah ada disajikan dilaporan kinerja	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
	kinerja pemerintah tingkat provinsi dan pusat dan menyajikan informasi keuangan terkait pencapaian per sasaran.		
6.	Memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan kinerja	Peningkatan kualitas laporan kinerja	
7.	Agar setiap evaluasi program/kegiatan dan rencana aksi menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya	Melakukan Evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program lebih di setiap bulan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan
8.	Agar memanfaatkan hasil evaluasi program/rencana aksi dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi evaluasi program/rencana aksi dan tindak lanjut tersebut tertuang dalam evaluasi evaluasi program/rencana aksi triwulan berikutnya	Melakukan Evaluasi program/rencana aksi per bidang	Telah dilakukan evaluasi kinerja program/rencana aksi perbidang

3.4 Realisasi Anggaran

Dari total Anggaran Rp. **10.606.709.882,00** per 31 Desember 2023 dapat terealisasi senilai Rp. **10.484.095,177**, - atau sebesar **98,84%**. Untuk Belanja Operasi dengan alokasi Rp. **9.981.194.882**, - dapat terealisasi sebesar Rp. **9.859.251.877**, - atau sebesar **98,78%**. Sedangkan Belanja Modal dengan alokasi Rp. **625.515.000**, - dapat terealisasi sebesar Rp. **624.843.300** atau sebesar 99,89 %. Dapat dilihat dengan tabel sbb:

No	Belanja	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	BELANJA	10.606.709.882	10.484.095,177	98,84
1	BELANJA OPERASI	9.981.194.882	9.859.251.877	98,78
	Belanja Pegawai	2.376.100.837	2.361.887.025	99,40
	Belanja Barang dan Jasa	7.605.094.045	7.497.364.852	98,58
2	BELANJA MODAL	625.515.000	624.843.300	99,89
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	625.515.000	624.843.300	99,89
	Total	10.606.709.802	10.484.095.177	98,84

NO.	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	ANGGARAN 2023		Realisasi	Capaian %
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	3.064.238.275	3.433.414.732	3.409.873.067	99,31
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.610.000	56.620.000	55.821.440	98,59
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	25.010.000,00	24.918.950,00	99,64
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.000.000	3.000.000,00	2.638.540,00	87,95
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3.000.000	3.000.000,00	2.889.600,00	96,32
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.610.000	25.610.000,00	25.374.350,00	99,08
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.718.875	2.353.380.837	2.339.004.795	99,39
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.182.358.875	2.321.620.837,00	2.307.407.025,00	99,39
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	29.360.000	31.760.000,00	31.597.770,00	99,49
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	16.290.000	16.290.000	16.286.600	99,98
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.290.000	16.290.000,00	16.286.600	99,98
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.270.000	62.930.000	56.893.110	90,41
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		22.270.000,00	21.442.110,00	96,28
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	40.660.000,00	35.451.000,00	87,19
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.270.000	605.723.400	604.391.827	99,78
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000	3.250.000,00	3.249.000,00	99,97
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.800.000	5.800.000,00	5.793.500,00	99,89
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000,00	7.344.200,00	97,92
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000	6.120.000,00	5.120.000,00	83,66
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.100.000	19.600.000,00	19.589.000,00	99,94

LAKIP DPPKB 2023

16	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	415.500.000	563.453.400,00	563.296.127,00	99,97
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.199.000	110.670.495	109.930.119	99,33
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.000	14.999.000,00	14.960.500,00	99,74
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.400.000	54.871.495,00	54.169.619	98,72
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.800.000	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.830.000	227.800.000	227.545.176	99,89
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	88.000.000	148.000.000,00	147.965.176,00	99,98
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.880.000	9.800.000,00	9.730.000,00	99,29
22	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	70.000.000,00	69.850.000,00	99,79
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	388.353.050	380.848.050	358.208.475	94,06
8	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	74.940.000	66.435.600	65.271.150	98,25
23	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	22.890.600	22.890.600,00	22.616.150,00	98,80
24	Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal	26.700.000	19.115.000,00	18.225.000,00	95,34
25	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	25.350.000	24.430.000,00	24.430.000,00	100,00
26	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	314.412.450	314.412.450	292.937.325	93,17
9	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	178.212.460	178.212.450,00	169.818.430	95,29

LAKIP DPPKB 2023

	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
27	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	136.200.000	136.200.000,00	123.118.895,00	90,40
28	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	388.353.050	380.848.050	358.208.475	94,06
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	4.929.143.100	4.639.401.100	4.584.257.615	98,81
10	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	1.213.687.000	1.222.410.000	1.214.652.555	99,37
30	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	95.045.000	95.045.000,00	92.409.945,00	97,23
31	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	37.575.000	38.495.000,00	38.375.000,00	99,69
32	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000,00	149.952.450,00	99,97
33	Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)	203.457.000	203.457.000,00	203.218.055,00	99,88
34	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	636.700.000	636.700.000,00	632.165.905,00	99,29
35	Pengendalian Program KKBPK	90.910.000	98.713.000,00	98.531.200,00	99,82
11	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.493.689.000	1.499.484.000	1.488.132.900	99,24
36	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	126.102.000	131.897.000,00	130.933.100	99,27
37	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.367.587.000	1.367.587.000,00	1.357.199.800,00	99,24
12	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat	1.778.827.100	1.473.027.100	1.452.532.410	98,61

LAKIP DPPKB 2023

	dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
38	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	55.316.000	55.316.000,00	51.990.100,00	93,99
39	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	776.296.100	776.296.100,00	759.844.010,00	97,88
40	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	931.315.000	625.515.000,00	624.843.300,00	99,89
41	Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.900.000	15.900.000,00	15.855.000,00	99,72
13	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	442.940.000	444.480.000	428.939.750	96,50
42	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	442.940.000	444.480.000,00	428.939.750,00	96,50
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.208.829.000	2.153.046.000	2.131.756.020	99,01
14	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.192.229.000	2.137.446.000	2.116.217.020	99,01
44	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	19.603.000	19.603.000,00	19.102.800,00	97,45
45	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	360.000.000	352.170.000,00	352.170.000,00	100,00

LAKIP DPPKB 2023

46	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	168.142.000	131.157.000,00	126.118.750,00	96,16
47	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1.442.700.000	1.442.700.000,00	1.427.615.000,00	98,95
48	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	184.640.000	180.342.000,00	179.786.520,00	99,69
49	Advokasi dan Promosi IPK	17.144.000	11.474.000,00	11.423.950,00	99,63%
15	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	16.600.000	15.600.000	15.539.000	99,61
50	Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	16.600.000	15.600.000,00	15.539.000	99,61
	BELANJA OPERASI	9.702.854.931	9.981.194.882	9.859.251.877	
	BELANJA MODAL	475.137.500	625.515.000	624.843.300	
	TOTAL BELANJA	10,177,992,431	10.606.709.882	10.484.095.177	98.84

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023
TRIWULAN IV
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100,00	16.654.138.895	10,00	-	100	3.433.414.732	422.730.191	#####	712.729.814	1.063.911.451	-	3.409.873.067	0,00%	99,31%	100,00	3.409.873.067	20,47%							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	200,00	451.811.587	0,00	-	100	56.620.000	25	4.483.450	25	10.703.850	25	1.500.000	25	39.134.140	100,00%	98,59%	100,00	55.821.440	50,00%	54,52%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		78.508.091	0,00	-	3	25.010.000	1	848.700	1	3.750.000	1	1.500.000	-	18.820.250	3	24.918.950	100,00%	99,64%	3,00	24.918.950	0,00%	31,74%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)		47.345.955	0,00	-	2	3.000.000	-	-	-	1	-	1	2.638.540	2	2.638.540	100,00%	87,95%	2,00	2.638.540	0,00%	5,57%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kali)		33.912.665	0,00	-	2	3.000.000	1	1.214.750	-	-	-	1	1.674.850	2	2.889.600	100,00%	96,32%	2,00	2.889.600	0,00%	8,52%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun (Dokumen)		292.044.876	0,00	-	8	25.610.000	4	2.420.000	2	6.953.850	1	-	1	16.000.500	8	25.374.350	100,00%	99,08%	8,00	25.374.350	0,00%	8,69%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	200,00	12.332.353.180	0,00	-	100	2.353.380.837	25	283.928.613	25	976.149.943	25	440.913.004	25	638.013.235	100	2.339.004.795	100,00%	99,39%	100,00	2.339.004.795	50,00%	37,09%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)		12.157.869.730	0,00	-	20	2.321.620.837	19	283.928.613	19	964.449.943	20	433.576.004	20	625.452.465	20	2.307.407.025	97,50%	99,39%	19,50	2.307.407.025	0,00%	18,98%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan persemester (Laporan)		174.483.450	0,00	-	13	31.760.000	4	-	4	11.700.000	4	7.337.000	1	12.560.770	13	31.597.770	100,00%	99,49%	13,00	31.597.770	0,00%	18,11%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu (%)	200,00	105.505.668	0,00	-	100	16.290.000	25	487.850	25	5.250.000	25	4.818.000	25	5.730.750	100	16.286.600	100,00%	99,98%	100,00	16.286.600	50,00%	15,44%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		105.505.668	0,00	-	4	16.290.000	1	487.850	1	5.250.000	1	4.818.000	1	5.730.750	4	16.286.600	100,00%	99,98%	4,00	16.286.600	0,00%	15,44%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	200,00	289.365.400	0,00	-	100	62.930.000	25	2.000.000	25	3.000.000	25	23.290.000	25	28.603.110	100	56.893.110	100,00%	90,41%	100,00	56.893.110	50,00%	43,78%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					6			7		8		9		10			11		12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16									
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	177.525.400	0,00	-	8	22.270.000	2	2.000.000	2	3.000.000	2	7.535.000	2	8.907.110	8	21.442.110	100,00%	96,28%	8,00	21.442.110	0,00%	12,08%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	111.840.000	0,00	-	2	40.660.000	-	-	-	-	2	15.755.000	-	19.696.000	2	35.451.000	100,00%	87,19%	2,00	35.451.000	0,00%	31,70%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	200,00	2.232.671.150	0,00	-	100	605.723.400	25	88.950.080	25	134.106.355	25	177.582.301	25	203.753.091	100	604.391.827	100,00%	99,78%	100,00	604.391.827	50,00%	160,50%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	17.066.350	0,00	-	2	3.250.000	2	-	2	1.621.600	2	810.800	2	816.600	2	3.249.000	100,00%	99,97%	2,00	3.249.000	0,00%	19,04%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	30.119.500	0,00	-	203	5.800.000	50	1.290.500	50	1.289.000	50	1.239.000	53	1.975.000	203	5.793.500	100,00%	99,89%	203,00	5.793.500	0,00%	19,24%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	51.799.900	0,00	-	3	7.500.000	3	292.000	3	870.000	3	2.742.000	3	3.440.200	3	7.344.200	100,00%	97,92%	3,00	7.344.200	0,00%	14,18%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)	30.660.000	0,00	-	60	6.120.000	10	920.000	20	1.080.000	20	1.120.000	10	2.000.000	60	5.120.000	100,00%	83,66%	60,00	5.120.000	0,00%	16,70%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu (Kali)	30.525.000	0,00	-	125	19.600.000	16	764.000	40	3.520.000	50	3.910.000	19	11.395.000	125	19.589.000	100,00%	99,94%	125,00	19.589.000	0,00%	64,17%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	2.072.500.400	0,00	-	411	563.453.400	50	85.683.580	100	125.725.755	250	167.760.501	11	184.126.291	411	563.296.127	100,00%	99,97%	411,00	563.296.127	0,00%	27,18%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	200,00	561.431.910	0,00	-	100	110.670.495	25	17.850.956	25	31.630.179	25	25.713.859	25	34.735.125	100	109.930.119	100,00%	99,33%	100,00	109.930.119	50,00%	59,14%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	78.431.910	0,00	-	400	14.999.000	50	2.470.000	50	3.430.000	150	4.210.650	150	4.849.850	400	14.960.500	100,00%	99,74%	400,00	14.960.500	0,00%	19,07%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)	295.000.000	0,00	-	3	54.871.495	3	9.380.956	3	17.200.179	3	12.503.209	3	15.085.275	3	54.169.619	100,00%	98,72%	3,00	54.169.619	0,00%	18,36%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	188.000.000	0,00	-	3	40.800.000	3	6.000.000	3	11.000.000	3	9.000.000	3	14.800.000	3	40.800.000	100,00%	100,00%	3,00	40.800.000	0,00%	21,70%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	200,00	681.000.000	0,00	-	100	227.800.000	25	25.029.242	25	49.661.284	25	38.912.650	25	113.942.000	100	227.545.176	100,00%	99,89%	100,00	227.545.176	50,00%	90,85%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja				Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab														
					5		6			7		8		9		10			11		12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16									
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan (Unit)		451.000.000	0,00	-	96	148.000.000	5	21.346.242	45	35.812.284	30	30.827.850	16	59.979.000	96	147.965.176	100,00%	99,98%	96,00	147.965.176	0,00%	32,81%														
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik (Unit)		75.000.000	0,00	-	3	9.800.000	3	1.500.000	3	1.350.000	3	1.200.000	3	5.680.000	3	9.730.000	100,00%	99,29%	3,00	9.730.000	0,00%	12,97%														
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)		155.000.000	0,00	-	2	70.000.000	2	2.183.000	2	12.499.000	2	6.885.000	2	48.283.000	2	69.850.000	100,00%	99,79%	2,00	69.850.000	0,00%	45,06%														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																98,31%	99,31%																						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																							
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (OPD)		2,01	134.200.000	0,00	-	2,01	380.848.050		9.251.000		88.356.195		99.930.500		160.670.780		358.208.475	0,00%	94,06%	2,02	358.208.475		266,92%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk (Dokumen)		4,00	134.200.000	0,00	-	2	66.435.600	-	-	-	42.857.000	-	16.715.400	2	5.698.750	2	65.271.150	100,00%	98,25%	2,00	65.271.150	50,00%	13,58%													
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal (Laporan)				0,00	-	3	22.890.600	-	-	3.982.000	3	16.715.400	-	1.918.750	3	22.616.150	100,00%	98,80%	3,00	22.616.150	0,00%	0,00%														
		Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)		134.200.000	0,00	-	24	19.115.000	-	-	-	14.445.000	24	-	-	3.780.000	24	18.225.000	100,00%	95,34%	24,00	18.225.000	0,00%	13,58%														

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					6			7		8		9		10			11		12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16												
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	857.500.000	0,00	-1056	203.457.000	264	21.800.000	-	27.579.305	528	80.547.750	264	73.291.000	1.056	203.218.055	100,00%	99,88%	1056,00	203.218.055	0,00%	23,70%				
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.430.000.000	0,00	-	636.700.000	12	46.892.800	12	134.715.300	12	122.041.800	12	328.516.005	12	632.165.905	100,00%	99,29%	12,00	632.165.905	0,00%	26,02%				
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	200.000.000	0,00	-	98.713.000	-	-	1	7.700.000	1	34.255.300	-	56.575.900	2	98.531.200	100,00%	99,82%	2,00	98.531.200	0,00%	49,27%				
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (Persen)	200,00	9.072.914.400	0,00	-	1.499.484.000	100	35.101.900	100	370.301.650	100	379.130.000	100	703.599.350	100	1.488.132.900	100,00%	99,24%	100,00	1.488.132.900	50,00%	43,45%			
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelebaran dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (Orang)	473.284.400	0,00	-	131.897.000	100	35.101.900	100	24.000.000	96	24.000.000	96	47.831.200	98	130.933.100	98,00%	99,27%	98,00	130.933.100	0,00%	27,66%				
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (Orang)	8.599.630.000	0,00	-	1.367.587.000	581	-	581	346.301.650	581	355.130.000	581	655.768.150	581	1.357.199.800	100,00%	99,24%	581,00	1.357.199.800	0,00%	15,78%				
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelebaran KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (Persen)	200,00	9.177.971.152	0,00	-	1.473.027.100	100	11.726.900	100	221.117.500	100	260.838.550	100	958.849.460	100	1.452.532.410	100,00%	98,61%	100,00	1.452.532.410	50,00%	89,46%			

Keterangan
17
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada

1034	1
1035	1
1036	1
1037	1
1038	0,975
1039	1
1040	1

Keterangan
17
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada

1052 1

1053 1

1054 1

1055 1

1056 1

Keterangan	
17	
Tidak Ada	
Tidak Ada	
Tidak Ada	
Tidak Ada	
Tidak Ada	
Tidak Ada	

1057 1

1058 1

1059 1

1060 1

1061 1

1062 1

Keterangan	
17	
Tidak Ada	
Tidak Ada	1063 1
Tidak Ada	1064 1
Tidak Ada	1065 1
Tidak Ada	
Tidak Ada	1066 0,98
Tidak Ada	1067 1

Keterangan	
17	
Tidak Ada	
Tidak Ada	1068 1
Tidak Ada	1069 1
Tidak Ada	1070 1
Tidak Ada	1071 1
Tidak Ada	1072 1

Keterangan	
17	
Tidak Ada	
Tidak Ada	1073
Tidak Ada	1074
Tidak Ada	1075
Tidak Ada	1076
Tidak Ada	1077

1

1

1

1

1

Keterangan
17
Tidak Ada
Tidak Ada

1078 1,125

1079 1

LAKIP DPPKB 2023

Berdasarkan tabel diatas, serapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 sebesar 98,84%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur yang diamanatkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur merupakan gambaran kinerja dinas tahun 2023, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2023. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja guna mencapai Visi 2021 – 2026 , Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menetapkan beberapa strategi, antara lain menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RPJMD dengan indikator-indikator yang terukur, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja, dan menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja.

KESIMPULAN

1. Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
2. Pencatatan dan Pelaporan Rutin sebagai bahan monitoring dan evaluasi program tidak berjalan dengan baik
3. Orientasi tenaga pelaksana Program baru pada tahap pencapaian out put belum pada out come
4. Advokasi dan KIE Program dilapangan belum berjalan secara optimal;
5. Kompetensi, Motivasi, dan Kinerja PKB/PLKB belum optimal
6. Pembangunan Keluarga melalui peran Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK R) belum berjalan secara optimal

7. Perluasan akses dan kualitas pelayanan
8. Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi sebagai bahan Advokasi dan KIE serta pemilihan media atau saluran;

REKOMENDASI

- Program atau kegiatan seharusnya disusun dengan matang didasari data dan informasi yang akurat dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- Pelaksanaan Program Bangga Kencana memerlukan perubahan pendekatan kepada masyarakat terutama generasi millennial
- Peningkatan kualitas SDM pengelola program melalui pelatihan, refreshing, atau studi banding.
- Perlunya inovasi dalam materi KIE, metode penyampaian, bentuk kegiatan KIE dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur IT agar tetap mengikuti perkembangan zaman.
- Memperluas jejaring kerjasama dengan mitra kerja potensial baik formal maupun informal yang merupakan penguatan dalam peningkatan komitmen stakeholder dalam program Bangga Kencana
- Setiap kegiatan yang strategis seharusnya dibuatkan Standar operasional prosedur (SOP).
- Setiap program dan kegiatan seharusnya dilakukan evaluasi dan monitoring setelah pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menilai apakah kegiatan tersebut dapat memberikan outcome terhadap indikator kinerja utama yang ingin dicapai. Serta hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang memuaskan saat pelaksanaan kegiatan/program tersebut

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya

Lampiran 1

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,6	2,31	88,8
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,05	53,07	151,41

Jumlah Anggaran Tahun 2023 Rp **7.173.295.150**

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Rp **7.074.222.110**

Lampiran II

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN : 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Total Fertility Rate (TFR)	2.6	2.79	93.18
Indeks Pembangunan			
2. Keluarga (iBangga)	35.05	53.07	151,41

FOTO KEGIATAN TAHUN 2023

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Kegiatan : Rapat Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Luwu Timur

Waktu : 1 Agustus 2023

Tempat : Aula Dinas P2KB Kab. Luwu Timur



Kegiatan : Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Luwu Timur dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Tahun 2023

Waktu : 07 September 2023

Tempat : Gedung Wanita Simpursiang Kab. Luwu Timur



Kegiatan : Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Luwu Timur dirangkaikan dengan Pengukuhan TPPS dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Waktu : 18 Desember 2023

Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur



b. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang

Kegiatan : Belanja Cetak Media KIE

Waktu : September 2023

Tempat : Kantor DPPKB Kabupaten Luwu Timur



c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Kegiatan : Mini Lokakarya di Tingkat Kecamatan

Waktu : 07 s.d 21 Maret 2023

Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Mini Lokakarya di Tingkat Kecamatan

Waktu : 24 Juli s.d 03 Agustus 2023

Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Mini Lokakarya di Tingkat Kecamatan
Waktu : 24 s.d 29 November 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



d. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan : Penyuluhan KB TW I
Waktu : 27 Februari s.d 3 Maret 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Penyuluhan KB TW II
Waktu : 08 s.d 22 Mei 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Penyuluhan KB TW III
Waktu : 15 September s.d 18 Oktober 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Penyuluhan KB TW IV
Waktu : 01 s.d 10 November 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Orientasi Tenaga Lini Lapangan
Waktu : 26 Juni s.d 10 Juli 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Pembinaan Kader I
Waktu : 04 s.d 05 Desember 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Pembinaan Kader II
Waktu : 21 s.d 23 Desember 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



e. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan : Identifikasi dan Seleksi Kasus AKS Tahap I
Waktu : 12 Juni 2023
Tempat : Aula Dinas P2KB Kab. Luwu Timur



Kegiatan : Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap I
Waktu : 10 Agustus 2023
Tempat : Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur



Kegiatan : Identifikasi dan Seleksi Kasus AKS Tahap II
Waktu : 31 Oktober 2023
Tempat : Aula Dinas P2KB Luwu Timur



Kegiatan : Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II
Waktu : 30 November 2023
Tempat : Aula Aula Sasana Praja



Kegiatan : Evaluasi Tindak Lanjut Audit Stunting
Waktu : 19 Desember 2023
Tempat : Gedung Wanita Simpursiang



1. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

b.

Kegiatan : Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
Waktu : Tahun 2023
Tempat : Kabupaten Luwu Timur



c. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kegiatan : Pelayanan KB MKJP dan Non MKJP

Waktu : Tahun 2023

Tempat : Faskes Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Pelayanan KB MKJP MOW

Waktu : 3 s.d 4 November 2023

Tempat : RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Pelayanan KB MKJP MOP

Waktu : 27 November 2023

Tempat : RS Palamonia Makassar



Kegiatan : Peringatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2023
Waktu : 25 - 26 Agustus 2023
Tempat : Kantor Perwakilan BKKBN Prov. Sulsel



d. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Kegiatan : Pengadaan Implat dan IUD Kit
Waktu : 21 Juli s.d 18 Oktober 2023
Tempat : Kantor Dinas P2KB Luwu Timur



e. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kegiatan : Pembinaan Pelayanan KB di Faskes

Waktu : 18 Agustus s.d 4 September 2023

Tempat : Kabupaten Luwu Timur



Kegiatan : Rapat Persiapan Pelayanan KB

Waktu : 28 September 2023

Tempat : Aula Dinas P2KB Kab. Luwu Timur



Kegiatan : Rapat Persiapan Pelayanan KB
Waktu : 28 Oktober 2023
Tempat : Aula Dinas P2KB Kab. Luwu Timur



Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan KB
Waktu : 15 Desember 2023
Tempat : Aula Dinas P2KB Kab. Luwu



DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK





DOKUMENTASI KEGIATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DAN INFORMAL





**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI
KEBIJAKAN DAMPAK KEPENDUDUKAN BAGI
PEMANGKU KEPENTINGAN**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB**

1. KELOMPOK KERJA



DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB

2. KELOMPOK KEGIATAN



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENYULUHAN PENGGERAKAN
PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA
UNTUK PKB / PLKB**



DOKUMENTASI KEGIATAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL



INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DOKUMENTASI PEMBINAAN KADER



DOKUMENTASI ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- **KEGIATAN PEMILIHAN DUTA GENRE YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 22 - 23 NOVEMBER 2023**





- KEGIATAN GENRE IN ACTION YANG DILAKSANAKAN DI KECAMATAN TOWUTI PADA TANGGAL 25 - 26 AGUSTUS 2023





DOKUMENTASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB KIT STUNTING)





**DOKUMENTASI SUB KEGIATAN PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

◇ **KEGIATAN LOMBA-LOMBA KB YANG DILAKSANAKAN DI 11 KECAMATAN SE
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA TANGGAL 23 - 30 OKTOBER 2023**









◇ KEGIATAN GENRE FESTIVAL YANG DILAKSANAKAN DI GEDUNG SIMPURUSIANG MALILI PADA TANGGAL 18 - 19 MEI 2023





DOKUMENTASI PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pendampingan Sasaran Ibu Hamil oleh
Tim Pendamping Keluarga Tahun

2023



Pendampingan Sasaran Ibu Pascasalin oleh TPK Tahun 2023



Pendampingan Sasaran Balita oleh TPK Tahun

2023



2023

Pendampingan Calon Pengantin oleh TPK Tahun

